

FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEANDALAN DAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN (Study Empiris Pada SKPD Pemda Riau)

Desmiyawati

Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRACT

This study aims to test the influence human resources, information technology, internal control and local financial monitoring to reliability and timeliness local government financial reporting. Research sample is an heads and staffs of SKPD's accounting department in Riau Province, Dumai City, Bengkalis district and Kampar district. Data collection was done by providing 361 questionnaires to heads and staffs of SKPD's accounting department. The collected data was processed using SPSS version 17 with multiple linier regressions. Results of research show the significant effects of human resources, internal control and local financial monitoring on reliability of local government financial reporting, while information technology has no effect. The study results also show that human resources and information technology affect significant on timeliness of local government financial reporting.

Keywords: Human Resources, Information Technology, Accounting Internal Control, Local Financial Monitoring, Reliability and Timeliness Local Government Financial Reporting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian Intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Sampel penelitian adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan tiap SKPD di Pemerintah Provinsi Riau, Kotamadya Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kampar. Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan 361 kuisioner kepada kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan tiap SKPD tersebut. Data yang terkumpul diolah menggunakan SPSS 17 dengan Regresi Linear Berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sumber daya manusia, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan Pemda, sementara teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan Pemda.

Kata kunci : Sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian internal, pengawasan keuangan daerah, keandalan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan ketepatan waktu

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Bentuk pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pihak tersebut antara lain masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan pemerintah (PP 71 tahun 2010). Informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah hanya akan bermanfaat jika informasi tersebut mempunyai kualitas yang baik. Informasi yang berkualitas menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki umpan balik, memiliki nilai prediktif serta disampaikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan andal apabila Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Ketepatan waktu menunjukkan kecepatan atau rentang waktu antara permintaan dan frekuensi pelaporan informasi yang diinginkan. Informasi yang tepat waktu akan menjadikan manajer mampu menghadapi ketidakpastian lingkungan yang dihadapinya secara efektif (Gordon dan Narayanan, 1984).

Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah, yaitu sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern serta pengawasan keuangan daerah.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007). Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Pegawai yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, tidak mengikuti pelatihan-pelatihan akuntansi serta tidak punya pengetahuan yang memadai tentang akuntansi akan menemui banyak kesulitan dan hambatan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks di pemerintahan, harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir,

dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas. Dengan adanya pengendalian intern akuntansi maka diharapkan laporan keuangan pemda dapat diandalkan.

Pengawasan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan (Yosa 2010).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya oleh Dinata (2004), Alimbudiono dan Fidelis (2004), Indriasari (2008), Zetra (2009), Andriani (2010), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Arfianti (2011), dan Mustafa dkk (2011).

Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Kota Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (Dinata, 2004). Penelitian Alimbudiono dan Fidelis (2004) memberikan temuan empiris bahwa pegawai berlatar pendidikan akuntansi di subbagian akuntansi Pemerintah XYZ masih minim, *job description*-nya belum jelas, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik belum dilaksanakan

Indriasari (2008) menemukan bukti teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumberdaya manusia tidak berpengaruh. Kemudian penelitian tersebut juga membuktikan bahwa sumberdaya manusia dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir.

Andriani (2010) membuktikan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan, sementara sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan.

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan ada pengaruh positif sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi, sementara sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah Subosukawonosraten.

Hasil penelitian Arfianti (2011) membuktikan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah Kabupaten Batang.

Hasil penelitian Mustafa dkk (2011) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap Keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Kemudian hasil penelitian membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Kota Kendari.

Kebanyakan dari hasil penelitian di atas tidak konsisten, hal ini mungkin disebabkan karena setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda. Mengingat pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, maka penelitian ini bertujuan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan Pemda Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: Apakah sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Riau.

KAJIAN TEORITIS

Teori Agency

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko.

Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: (1) Laporan Realisasi APBN/APBD, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian Pengaruh SDM Terhadap Keandalan Laporan Keuangan

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Permendagri 13 Tahun 2006 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran. Perubahan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai.

Penelitian Alimbudiono & Fidelis (2004), Dinata (2004), Imelda (2005), menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya *job description*, dan belum dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada Pemerintah XYZ, Pemerintah Kota Palembang, atau Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) serta Andriani (2010) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemda. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemda

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et.al* (1991) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna system informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan.

Semakin maju teknologi informasi semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi oleh para pemakai makin memudahkan dalam melakukan pekerjaannya, seperti mengubah data akuntansi menjadi informasi atau untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan audit yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era reformasi berdampak signifikan terhadap system informasi akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan/organisasi. Dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer (www.google.com).

Dalam Penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Mustafa, 2011).

Penelitian Indriasari, 2008; Widyaningrum & Rahmawati, 2010; Andriani, 2010; Rosalin, 2011 membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemda. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemda

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan

Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundangundangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian Indriasari (2008) dan Rosalin (2011) menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengendalian Intern berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemda

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Laporan Keuangan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Yosa, 2010).

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain:

- a) Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- b) Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- c) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan.
- d) Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus. Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penelitian Arfianti (2011) tidak dapat membuktikan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang. Penelitian ini ingin mengkonfirmasi hasil penelitian tersebut sehingga dirumuskan hipotesis:

H4: Pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan penda

Pengaruh SDM Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan

Rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan.

Beberapa hasil penelitian seperti Indriasari (2008), Zetra (2009), Arfianti (2011) dan Mustafa, dkk (2011) membuktikan bahwa SDM berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan pemda. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis:

H5: Sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemda

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan

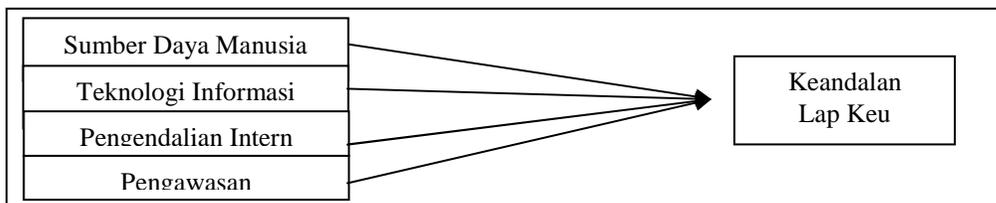
Penelitian Cohen *et al.* (2007) menemukan bahwa teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di kotamadya Yunani merupakan alat yang sangat berguna untuk menilai fungsionalitas sebuah sistem dan tingkat kesesuaian dengan lingkungan organisasional. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

Hasil penelitian Indriasari (2008), Zetra (2009), Rosalin (2011) dan Arfianti (2011) membuktikan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemda. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis:

H6: Teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemda.

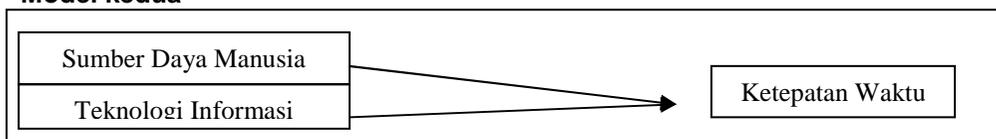
Model Penelitian

Model Pertama



Gambar 1
Pengaruh SDM, TI, Pengendalian Intern dan Pengawasan Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Model kedua



Gambar 2
Pengaruh SDM dan TI Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari Penelitian ini adalah Pengelola SKPD di Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan *purposive / judgement sampling*. Kriteria responden adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD yang merupakan kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan, sehingga tiap SKPD ditetapkan secara cluster sampling sebanyak 3 orang yang menjadi responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data penelitian dikumpulkan dengan cara mengirim kuesioner ke responden secara langsung.

Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian Variabel Independen

Sumber Daya Manusia. Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (GTZ & USAID/CLEAN Urban, 2001).

Teknologi Informasi. Teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari computer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software, database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al*, 2000). Beberapa indikator pada teknologi informasi dapat dilihat dengan adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010). Menurut Jurnal & Supomo (2002) untuk mengukur teknologi informasi dapat dilihat dari tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Konstruk Pemanfaatan teknologi Informasi diukur dengan indikator perangkat, pengelolaan data keuangan; dan perawatan.

Pengendalian Intern Akuntansi (PIA). Bagian dari pengendalian intern yang meliputi rencana organisasi, prosedur, dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang telah digunakan sebelumnya oleh Indriasari (2008).

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang telah digunakan sebelumnya oleh Arfianti (2010).

Variabel Dependen

Keterandalan. Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005).

Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :

- a) Penyajian Jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi (variability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpuloan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umumj dab tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Ketepatanwaktuan. Tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005).

Berikut disajikan ringkasan definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian:

Tabel 1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Item Pertanyaan
1. Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. (Laporan akhir studi GTZ & USAID/CLEAN Urban (2001)).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian keuangan/akuntansi anda memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup. 2. Paling tidak 10 persen dari staf subbagian keuangan/akuntansi anda merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi. 3. Subbagian keuangan/akuntansi anda memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas. 4. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai subbagian keuangan/akuntansi anda ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah. 5. Uraian tugas subbagian keuangan/akuntansi anda sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya. 6. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi. 7. Subbagian keuangan/akuntansi anda telah melaksanakan proses akuntansi. 8. Subbagian keuangan/akuntansi anda memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup. 9. Pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan. 10. Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.
2. Pemanfaatan teknologi Informasi	Tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. (Jurnali & Supomo (2002)).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian akuntansi/keuangan anda memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas. 2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja anda. 3. Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan. 4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. 5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi. 7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara

Faktor faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Desmiyawati)

Variabel	Definisi Operasional	Item Pertanyaan
3. Pengendalian Intern Akuntansi	Bagian dari pengendalian intern yang meliputi rencana organisasi, prosedur, dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi.	<p>teratur.</p> <p>8. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.</p> <p>1. Subbagian keuangan/ akuntansi anda menyelenggarakan sistem akuntansi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prosedur akuntansi penerimaan kas Prosedur akuntansi pengeluaran kas Prosedur akuntansi aset Prosedur akuntansi selain kas <p>2. Daftar rekening (<i>chart of account</i>) pemerintah daerah tersedia dan digunakan.</p> <p>3. Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.</p> <p>4. Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.</p> <p>5. Setiap transaksi dicatat dalam buku catatan akuntansi.</p> <p>6. Catatan akuntansi dijaga untuk tetap "up-to-date".</p> <p>7. Laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan</p> <p>8. Sistem akuntansi yang ada memungkinkan <i>audit/transaction trail</i>.</p> <p>9. Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD.</p>
4. Pengawasan Keuangan	proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010)	<p>1. Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.</p> <p>2. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dilakukan (triwulan, semester, tahunan).</p> <p>3. Setiap kegiatan/transaksi keuangan telah dicatat dan setiap pencatatan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup.</p> <p>4. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar.</p> <p>5. Bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pencatatan telah diarsipkan/didokumentasikan dengan baik.</p> <p>6. Terdapat sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas.</p> <p>7. Laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta disusun secara tepat waktu.</p>
5. Nilai Informasi - Keterandalan - Ketepatan waktuan	Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. (PP No. 24 Tahun 2005)	<p>1. Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.</p> <p>2. Neraca disajikan.</p> <p>3. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD disajikan.</p> <p>4. Catatan atas laporan keuangan disajikan.</p> <p>5. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.</p> <p>6. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan pihak</p>

Variabel	Definisi Operasional	Item Pertanyaan
	Tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. (PP No. 24 Tahun 2005)	<p>eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.</p> <p>7. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.</p> <p>1. Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.</p> <p>2. Laporan-laporan sering disediakan secara sistematis dan teratur, misal: laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan (bila laporan jarang tersedia berikanlah tanda pada angka satu).</p> <p>3. Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur</p> <p>a. Laporan realisasi semester pertama</p> <p>b. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD</p> <p>c. Neraca</p> <p>d. Catatan atas Laporan Keuangan</p>

Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin mulai dari Sangat Tidak Setuju s/d Sangat Setuju.

Pengujian Data

Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk mengetahui kevalidan butir-butir pertanyaan untuk masing-masing variabel atau untuk mengetahui validitas konstruk. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai *cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai *cut off* untuk menentukan reliabilitas instrumen adalah nilai *cronbach alpha* lebih dari 0.60 (Nunnally, 1978). Hasil pengujian menunjukkan semua variabel valid dan reliabel. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data, bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Untuk pengujian tersebut dilakukan dengan melihat *normal probability plot*. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (ghozali, 2005). Hasil uji normal P-P plot memperlihatkan titik-titik me yebar disekitar garis diagonal, hal ini menunjukkan model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2
Hasil uji validitas dan reliabilitas

Variabel	Koefisien Korelasi	<i>Cronbach Alpha</i>
SDM	0,523 – 0,687	0,752
Teknologi Informasi	0,540 -0,667	0,715
Pengendalian Intern	0,564 – 0,759	0,765
Pengawasan Keu Daerah	0,739 – 0,809	0,790
Keandalan	0,656 – 0,830	0,781
Ketepatan Waktu	0,691 – 0,790	0,805

Sumber: data olahan (2013)

Uji Multikolinearitas, dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel independen. Jika nilai VIF > 10 atau nilai tolerance < 0,10 berarti terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2005).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas dan Tolerance

Variabel	VIF	Tolerance	Kesimpulan
SDM	1,877	0,533	Tidak ada multikolinearitas
Teknologi Informasi	1,801	0,555	
Pengendalian Intern	2,455	0,407	
Pengawasan Keu Daerah	1,980	0,505	

Sumber: data olahan (2013)

Uji Autokorelasi, bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (Ghozali, 2005). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan tes Durbin Watson. Dari pengujian diperoleh nilai statistik *Durbin-Watson* sebesar 1,423, maka dapat disimpulkan model regresi bebas dari pengaruh autokorelasi karena berada diantara -2 dan 2.

Uji Heterokedastisitas, terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambar dalam spesifikasi model regresi, misalnya perubahan struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat keakuratan data. Dalam penelitian ini, untuk melihat ada atau tidak heterokedastisitas dilakukan dengan *Scatterplot*. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu yang jelas maka terjadi heteroskedastisitas, jika tidak maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari grafik dapat dilihat bahwa model regresi bebas heteroskedastisitas.

Analisis Data

Setelah pengujian validitas dan reliabilitas, serta setelah dipenuhinya asumsi klasik di atas, maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan regresi berganda. Persamaan yang digunakan yaitu:

$$Y_1 = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_1$$

$$Y_2 = a + \beta_5 X_1 + \beta_6 X_2 + e_2$$

dimana :

Y_1 : Keandalan	X_3 : Pengendalian Intern
Y_2 : Tepat Waktu	X_4 : Pengawasan Keuangan Daerah
X_1 : Kapasitas SDM	$\beta_1 \dots \beta_6$: Koefisien Regresi
X_2 : Teknologi Informasi	

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Pertama

Model pertama digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan 4. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 4:

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa sumber daya manusia, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap

keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dengan tingkat signifikansi $p < 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah merupakan faktor penting yang mendukung dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan Pemda. Akan tetapi teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemda dengan signifikansi $p > 0.05$. Hal ini kemungkinan disebabkan karena teknologi yang digunakan hanya sebatas penggunaan komputer untuk menginput data transaksi secara manual. Hal ini kemungkinan tidak banyak membantu dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan Pemda terutama di Provinsi Riau.

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis 1 s/d 4:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.861	.162		5.325	.000
	SDM	.109	.047	.117	2.319	.021
	TI	.002	.049	.002	.037	.970
	Pengendalian	.332	.058	.336	5.701	.000
	Pengawasan	.351	.046	.384	7.659	.000

a. Dependent Variable: keandalan

Pengujian Model Kedua

Model kedua digunakan untuk menguji hipotesis 5 dan 6. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, dengan tingkat signifikansi $p < 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia dan teknologi informasi merupakan faktor penting yang mendukung dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Pemda. Dengan adanya SDM yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan akan membantu mereka untuk dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Begitu juga dengan adanya bantuan komputer, volume transaksi pemerintah yang begitu besar dan kompleks dapat segera diproses sehingga para pegawai dapat menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis 5 dan 6:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.738	.221		7.876	.000
	SDM	.300	.068	.267	4.391	.000
	TI	.284	.063	.275	4.510	.000

a. Dependent Variable: timeliness

Hasil pengujian untuk model 1 dan 2 menunjukkan nilai F sebesar 108,111 dan 57,540 dengan probabilitas masing-masing $0.000 < \alpha < 0.05$, serta nilai adjusted R Square sebesar 0,543 dan 0,239. Ini berarti variabel-variabel independen yang digunakan dalam model penelitian secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian Model Pertama membuktikan bahwa SDM, Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Keandalan. Sedangkan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemda.
2. Hasil pengujian Model Kedua membuktikan bahwa SDM dan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu laporan keuangan.

Saran

1. Penelitian hanya menggunakan data yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau, Kota Dumai dan dua kabupaten yaitu Kampar dan Bengkalis. Agar hasil dapat digeneralisasi, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data yang berasal dari seluruh kabupaten dan kota dari suatu Provinsi.
2. Untuk mengumpulkan data penelitian hanya menggunakan daftar kuisisioner, yang kemungkinan tidak di jawab oleh responden yang tepat sehingga menghasilkan jawaban yang bias. Penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan melakukan interview langsung dengan responden disamping pemberian kuisisioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Andriani Wiwik, 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Skripsi*. Politeknik Negeri Padang
- Arfianti, Dita, 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang), *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Chenhall, R.H., and Morris, D.,1986, "The Impact of Structure, Environment, and Interdependence on the Perceived Usefulness of Management Accounting Systems", *The Accounting Review*, Vol.61, January, pp.16-35.
- Dinata, Anton Mulhar. 2004. *Tinjauan Atas Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya*

- Good Governance di Era Otonomi Daerah*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriasari Desi, 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *SNA XI*. Pontianak.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.
- Mustafa, Santiadji, Sutrisno dan Rosidi, 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. Universitas Haluoleo, Kendari. *E-Library Universitas Brawijaya/Economic/Faculty/Accounting Science Master Program*, Dec 2011.
- Nunnally, J.C. 1978. *Psychometric Theory*. New York, Mc Graw-Hill.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 *tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- , *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian pemerintah*
- , *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rosalin, Faristina, 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. *Skripsi*.UNDIP.
- Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66.
- Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban. Januari 2001. *Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintahan Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor. Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan DPRD*. www.gtzsfdm.or.id.
- Winiyaningrum dan Rahmawati, 2010. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Dan Keterandalan Pelaporan Keuangan. *SNA XIII*. Purwokerto.
- Zetra, 2009. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Universitas Gadjah Mada.